

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, A. 2004. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.
- Ilyas, A. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education. *Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia.*
- Hatrik, H. 1996. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Alumni Bandung
- Kurnia, T. S. (2007). Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Maulana, A. (2020). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. *Hukumonline. Com. Last modified.*
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana.* Bandung.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu.
- Nomor, P. M. A. R. I. (13). tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 2.*
- Rido, A. (1977). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf.* Alumni.
- Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI. *PALAR (Pakuan Law review), 3(1).*
- Yudi Wibowo Sukitno, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.* Jakarta Timur.

JURNAL

- Agustina, D., Zahara, A., Septiani, S., & Syahri, M. (2023). PENGARUH MUTU PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1553-2558.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. (*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Universitas Samudra).
- Hijawati, (2020). Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.
- Mardheana, D. (2017). *Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Aktaterhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234K/Pid/2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mukhlis, R. (2012). Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 203-204.
- Pala'langan, D. (2017). Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang (*Lex Et Societatis*)
- Purnamasari, I. M. (2021). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid. B/LH/2016/PN. Pwk). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- PUTERA, R. A. TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BATURAJA TERHADAP TINDAKAN MANAGER YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1956K/Pdt/2020.
- Ratomi, A. (2018). Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri).
- Rizqi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid. Sus- Anak/2020/PN. Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

SIANIPAR, C. K. G. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 1/PID. SUS- TPK/2021/PN. PGP DAN 5/PID. SUS-TPK/2019/PN. PGP.

SUSANTI, A. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36. Pemerintah Pusat. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat. Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pemerintah Pusat. Jakarta Pemerintah Indonesia

Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 13. Mahkamah Agung. Jakarta

Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan. Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. BN.2022/No.629. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta

Pengadilan Negeri. 2020. Putusan Pengadilan Negeri RI nomor 198/Pid.Sus/2020/PNByw

INTERNET

<https://www.pom.go.id/files/2016/cdew>”, diakses pada 20 Juli 2023

<Http://Www.Sirkulasiku.Blogspot.Com/2013/05/Unsur-Unsur-Tindak-Pidana.Html,Kabanjahe>, diakses pada 22 Juli 2023

https://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_Tindak_Pidana_Kabanjahe, diakses pada 22 Juli 2023

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadilah-masyarakat-yang-cerdas-dalam-mengonsumsi-obat>, diakses pada 1 Juli 2024

